

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Konseptual

2.1.1 Indikator dan Pengukuran Kemiskinan

World bank (2018) mendefinisikan kemiskinan dengan menggunakan dua pendekatan utama yakni kemiskinan moneter (*monetary poverty*) dan kemiskinan multidimensi (*multidimensional poverty*). Kemiskinan moneter diukur berdasarkan ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar karena pendapatan atau pengeluaran di bawah garis kemiskinan (*poverty line*). Sedangkan, kemiskinan multidimensi dilihat dari kekurangan terhadap akses multidimensi (kesehatan, pendidikan, sanitasi, dll.).

Laporan *Indonesia Poverty Assessment: Pathways Towards Economic Security* oleh World Bank (2020), menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia secara umum cenderung mengandalkan pendekatan moneter BPS dalam mengukur kemiskinan. Alkire et al. (2015) dalam penelitiannya juga menjelaskan bahwa pendekatan moneter masih menjadi metode yang paling umum digunakan dalam pengukuran kemiskinan di seluruh dunia. Pendekatan ini lebih banyak digunakan karena ketersediaan dan kemudahan dalam pengukuran data yang jauh lebih praktis. Secara konsistensi, data pendapatan dan pengeluaran rumah tangga umumnya lebih mudah untuk diperoleh dan diukur dibandingkan indikator multidimensi seperti kesehatan dan pendidikan. Di sisi lain, adanya standarisasi internasional yang ditetapkan oleh World Bank yakni penetapan garis kemiskinan global berdasarkan pendapatan yang memungkinkan perbandingan antar negara secara langsung.

Penting untuk disadari bahwa pendekatan moneter memiliki keterbatasan dalam menggambarkan betapa kompleksnya isu kemiskinan. Studi oleh Tran et al. (2015) menunjukkan bahwa di Vietnam, individu yang dikategorikan miskin secara moneter tidak selalu miskin secara multidimensi, dan terjadi hal sebaliknya. Hal ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan pendekatan multidimensi untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang kemiskinan. Studi tersebut mempertegas bahwa mengandalkan satu pendekatan saja dapat memberikan gambaran yang tidak lengkap mengenai kemiskinan. Oleh sebabnya, pendekatan multidimensi semakin diperhitungkan untuk memberikan gambaran yang lebih holistik tentang kemiskinan, terutama dalam perencanaan kebijakan sosial.

Pendekatan kemiskinan multidimensional menegaskan bahwa kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan pendapatan, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Pada tahun 2010, United Nations Development Programme (UNDP) dan Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) memperkenalkan Indeks Kemiskinan Multidimensional (*Multidimensional Poverty Index* atau MPI). Alkire & Santos (2010) menjelaskan mekanisme pengukuran kemiskinan oleh MPI didasarkan pada tiga dimensi utama yang diukur berdasarkan 10 indikator, yakni:

1. Kesehatan: Diukur melalui indikator nutrisi (*nutrition*) dan angka kematian bayi (*child mortality*)
2. Pendidikan: Diukur melalui indikator lama sekolah (*years of schooling*) dan kehadiran di sekolah (*school attendance*)

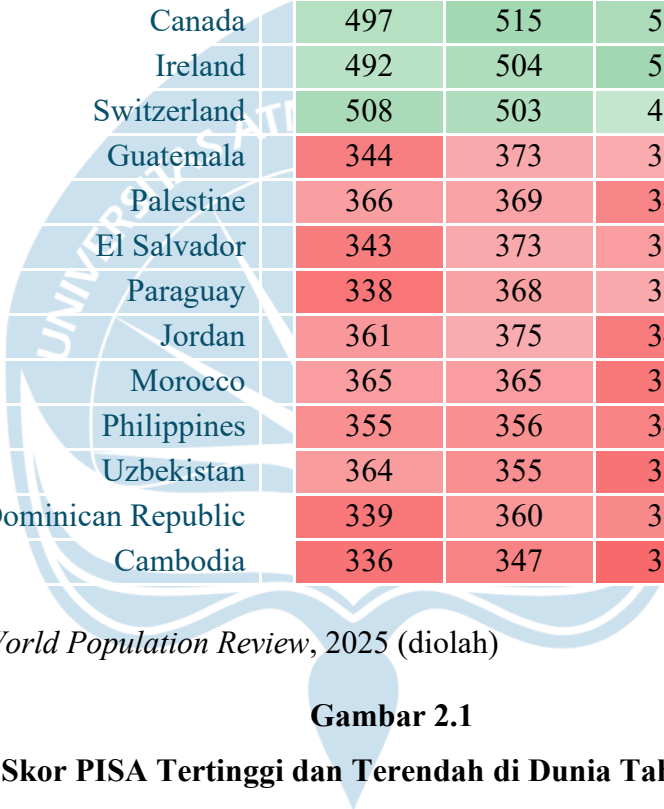
3. Standar hidup: Diukur melalui indikator akses terhadap bahan bakar untuk memasak, sanitasi, air bersih, listrik, kondisi lantai rumah, dan kepemilikan aset (*cooking fuel, sanitation, water, electricity, floor, assets*).

2.1.2. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kemiskinan

2.1.2.1. Faktor Sosial: Pendidikan

Human Capital Theory (Teori Modal Manusia) merupakan salah satu pendekatan teoritis yang paling relevan dalam menjelaskan mengenai hubungan antara pendidikan dan kemiskinan. Becker (1964) dalam bukunya *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education* menyatakan bahwa modal manusia yang mencakup pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja merupakan faktor utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas individu maupun negara.

Sejalan dengan teori tersebut, salah satu cara tidak langsung untuk mengukur kualitas pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi yakni melalui PISA (*Programme for International Student Assessment*), yang menilai kemampuan siswa dalam membaca, matematika, dan sains serta mengevaluasi efektivitas sistem pendidikan di berbagai negara. Visualisasi data di bawah ini memperkuat teori modal manusia (Becker, 1964) yang menekankan bahwa investasi dalam pendidikan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi suatu negara.



	Math	Science	Reading
Singapore	575	561	543
China	552	543	510
Japan	536	547	516
Taiwan	547	537	515
South Korean	527	528	515
Hong Kong	540	520	500
Estonia	510	526	511
Canada	497	515	507
Ireland	492	504	516
Switzerland	508	503	483
Guatemala	344	373	374
Palestine	366	369	349
El Salvador	343	373	365
Paraguay	338	368	373
Jordan	361	375	342
Morocco	365	365	339
Philippines	355	356	347
Uzbekistan	364	355	336
Dominican Republic	339	360	351
Cambodia	336	347	329

Sumber: *World Population Review*, 2025 (diolah)

Gambar 2.1

Skor PISA Tertinggi dan Terendah di Dunia Tahun 2022

Skor PISA mengindikasikan bahwa negara-negara dengan perekonomian yang lebih kuat cenderung memiliki sistem pendidikan yang lebih unggul. Sebaliknya, negara-negara dengan perekonomian berkembang atau rendah umumnya menunjukkan kualitas pendidikan yang lebih rendah. Data PISA menunjukkan bahwa negara-negara dengan skor pendidikan yang tinggi, seperti Singapura dan Jepang, juga memiliki tingkat pendapatan per kapita yang lebih tinggi. Sebaliknya, negara-negara dengan skor PISA yang rendah cenderung

menghadapi tantangan ekonomi yang lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berperan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dan tingkat kemiskinan.

Studi terbaru yang dilakukan di 62 negara oleh Baya et al. (2024) menemukan bahwa sejatinya pendidikan di tingkat dasar secara signifikan sangat memengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui GDP per kapita. Temuan ini menunjukkan bahwa pendidikan dasar yang mencakup kemampuan dasar seperti menulis, membaca, dan menghitung memiliki dampak yang jauh lebih besar dalam mendorong perekonomian suatu negara.

Hal ini sejalan dengan hasil studi Hanushek dan Woessmann (2011) yang menyatakan bahwa keterampilan kognitif (modal pengetahuan), yang diukur melalui nilai ujian, memiliki nilai prediksi yang lebih kuat terhadap pertumbuhan ekonomi dibandingkan model pertumbuhan ekonomi tradisional yang hanya berfokus pada rata-rata lama sekolah sebagai proksi modal manusia. Studi tersebut juga menemukan bahwa tingginya kemampuan kognitif berkontribusi secara signifikan terhadap kesetaraan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, karena individu yang memiliki terampil tinggi akan cenderung lebih muda mengakses peluang kerja yang lebih baik.

Pada konteks negara berkembang seperti Indonesia, meningkatkan kualitas dan akses terhadap pendidikan yang memadai menjadi suatu urgensi yang sangat penting untuk didorong demi meningkatkan daya saing tenaga kerja dan memperkecil kesenjangan ekonomi antar kelompok masyarakat. Studi terbaru dari

World Bank (2023) menunjukkan bahwa peningkatan akses pendidikan berkualitas dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja hingga 20% dan memperkecil kesenjangan pendapatan antar kelompok sosial. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan harus menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan ekonomi.

2.1.2.2. Faktor Demografi: Pertumbuhan penduduk

Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor demografi yang berperan penting dalam dinamika sosial dan ekonomi di suatu negara. Menurut BPS (2023), pertumbuhan penduduk merupakan perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu yang dipengaruhi oleh tiga faktor utama yakni kelahiran, kematian, dan migrasi. Pertumbuhan penduduk kemudian banyak dikaitkan dengan dinamika ekonomi terutama pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan oleh Trisnu dan Suidiana (2019) menemukan pengaruh faktor-faktor pertumbuhan penduduk, pengangguran, dan pendidikan berkontribusi besar terhadap kemiskinan di Bali. Pertumbuhan penduduk juga berdampak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi-Provinsi mayoritas Muslim di Indonesia (Sari & Rofiuddin, 2023). Walaupun pertumbuhan penduduk sering dikaitkan dengan peningkatan kemiskinan di negara-negara berkembang, namun menariknya fenomena ini juga terjadi di negara maju.

Studi yang dilakukan oleh Yip et al. (2017) menunjukkan fenomena menarik yang terjadi di Hong Kong yang merupakan wilayah maju berpendapatan tinggi. Walaupun tingkat kemiskinan di wilayah tersebut mengalami penurunan, namun adanya perubahan struktur demografi seperti penuaan populasi, berkurangnya ukuran rumah tangga, dan pertumbuhan penduduk tetap

berkontribusi terhadap peningkatan jumlah orang miskin dan kesenjangan kemiskinan. Fenomena ini membuktikan adanya hubungan kompleks dan multidimensional antara kemiskinan dan kekayaan. Walaupun suatu negara memiliki ekonomi yang kuat dan pendapatan per kapita yang tinggi, hal tersebut tidak selalu langsung mengatasi masalah kemiskinan karena dimensi ketimpangan sosial dan struktural yang sering kali diabaikan dalam analisis ekonomi yang hanya fokus pada indikator makroekonomi seperti pendapatan per kapita.

Teori Demografi umumnya digunakan untuk memahami dan menjelaskan bagaimana pertumbuhan penduduk menjadi faktor kunci yang memberikan dampak besar terhadap aspek pembangunan berkelanjutan seperti kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan (Tambunan et al., 2024). Menurut laporan resmi *World Development Indicators* oleh World Bank, secara teori ada tiga elemen utama yang mempengaruhi dengan Pertumbuhan penduduk, yakni:

1. Tingkat Kelahiran (*fertility*): tingkat kelahiran yang tinggi akan meningkatkan jumlah penduduk, yang kemudian berpotensi mempengaruhi tingkat kemiskinan jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi.
2. Tingkat Kematian (*mortality*): penurunan tingkat kematian karena peningkatan kualitas kesehatan dapat mempengaruhi dinamika Pertumbuhan penduduk.
3. Migrasi: Pertumbuhan penduduk juga dipengaruhi oleh migrasi, baik internal (dari desa ke kota) maupun internasional (imigrasi dan

emigrasi). Migrasi berperan penting dalam mendistribusikan populasi penduduk di suatu wilayah.

Masing-masing faktor ini memiliki dampak yang signifikan terhadap komposisi dan ukuran populasi suatu negara, yang pada hakikatnya akan memengaruhi pasar tenaga kerja. Tingkat kelahiran yang tinggi akan mencetak lebih banyak individu yang akan memasuki dunia kerja. Apabila tingginya penawaran tenaga kerja tidak diimbangi dengan jumlah lapangan kerja yang ada, maka akan menyebabkan tingginya tingkat pengangguran yang mengarah pada kemiskinan. Studi oleh Widodo et al. (2021) menemukan bahwa *Total Fertility Rate* (TFR) atau Angka Fertilitas Total berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Sumatra Barat. Temuan ini menjelaskan bahwa jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya (TFR) memiliki hubungan yang kuat dan nyata terhadap tingkat kemiskinan. Apabila angka kelahiran yang tinggi menyebabkan jumlah anggota keluarga bertambah, tetapi sumber daya ekonomi keluarga tetap terbatas, maka beban ekonomi keluarga akan semakin berat. Fenomena ini tentu menyebabkan terjadinya peningkatan angka kemiskinan.

Mortalitas dan kemiskinan merupakan *vicious cycle* yang saling mempengaruhi secara negatif. Kedua faktor ini kemudian terus menyebabkan lingkaran yang terus berulang dan menciptakan siklus yang sulit untuk diputus. Banerjee & Duflo (2011) dalam buku *Poor Economics* menuturkan bahwa kemiskinan tidak selalu terkait dengan rendahnya pendapatan saja, tapi adanya keterbatasan akses terhadap sumber daya dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan

layanan keuangan. Masyarakat miskin terjebak dalam *poverty trap* karena kurangnya akses terhadap sumber daya penting tersebut yang kemudian akan berdampak pada rendahnya produktivitas tenaga kerja dan pendapatan. Akibatnya, anak-anak dari keluarga miskin akan terus mengalami keterbatasan yang sama yang kemudian menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus (Banerjee & Duflo, 2011). Di sisi lain, tingginya angka kematian terutama pada kelompok usia produktif dapat mendorong rumah tangga ke dalam kemiskinan dan memperdalam ketimpangan ekonomi.

Studi oleh Resaski & Marta (2024) menemukan bahwa migrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan rumah tangga perkotaan. Migrasi masyarakat perdesaan ke perkotaan merupakan salah satu strategi yang dilakukan dengan harapan untuk meningkatkan pendapatan. Namun migrasi akan membawa dampak negatif jika kurangnya kesempatan kerja. Kondisi ini akan diperparah apabila terjadi peningkatan kepadatan penduduk di kota, tingginya tingkat pengangguran, serta terbentuknya pemukiman kumuh.

2.1.2.3. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan atau *dependency ratio* merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia non-produktif berumur 0-14 tahun ditambah dengan jumlah penduduk di atas 65 tahun dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (BPS, 2025). Tingginya rasio ketergantungan umumnya menjadi indikator beban ekonomi yang tinggi bagi penduduk usia produktif dan fenomena ini dapat menghambat akumulasi tabungan dan investasi pada level rumah tangga miskin (Todaro & Smith, 2015). Semakin tinggi rasio ketergantungan, maka semakin

tinggi beban yang harus ditanggung oleh penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sebaliknya, apabila presentasi rasio ketergantungan semakin rendah, maka semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak lagi produktif.

Rumus asio Kektergantungan dapat dihitung sebagai berikut:

$$RK_{total} = \frac{P_{0-14} + P_{65+}}{P_{15-64}} \times 100 \quad (1)$$

Keterangan:

RK_{total} = Rasio Ketergantungan Penduduk Usia Muda dan Tua

P_{0-14} = Jumlah Penduduk Usia Muda (0-14 tahun)

P_{65+} = Jumlah Penduduk Usia Tua (65 tahun keatas)

P_{15-65} = Jumlah Penduduk Usia Produktif (15-64 tahun)

Syamsuddin (2013) membuktikan bahwa rasio ketergantungan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin kecil rasio ketergantungan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya dapat menurunkan persentase penduduk miskin. Temuan lain oleh Vijayakumar (2013) memberikan bukti empiris kuat yang menjelaskan fakta bahwa rasio ketergantungan berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif dengan kemiskinan. Rasio ketergantungan yang tinggi menjadi permasalahan yang umum terjadi di sebagian besar negara-negara berkembang dan juga masyarakat di negara-negara tersebut menderita kemiskinan dan kelaparan dalam jangka waktu yang lama (Vijayakumar, 2013).

Studi oleh Cruz & Ahmed (2017) menuturkan bahwa perubahan struktur demografi mampu mempengaruhi kesejahteraan ekonomi dengan berbagai cara. Pertama, perubahan populasi usia kerja akan mempengaruhi pertumbuhan pendapatan dan tabungan dengan cara mengubah jumlah tenaga kerja relatif yang mampu bekerja. Kedua, perubahan populasi usia kerja pada level rumah tangga secara tidak proporsional, akan mempengaruhi keluarga paling miskin yang umumnya sudah memiliki tingkat rasio ketergantungan yang cukup tinggi (Cruz & Ahmed, 2017). Apabila populasi usia tenaga kerja semakin besar dan diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang luas, maka semakin banyak orang yang mampu bekerja dan meningkatkan pendapatannya. Fenomena ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkecil tingkat kemiskinan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan M. Nasir (2008) menyimpulkan bahwa permasalahan kemiskinan bersifat kompleks dan multidimensi. Kemiskinan di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor seperti ledakan demografi yang tidak diimbangi dukungan ekonomi, pengangguran, beban ketergantungan yang rendah, upah minimum yang tidak memadai, taraf hidup masyarakat yang buruk, maupun tingkat pendidikan dan kesehatan yang rendah. Menurut Smith dalam karyanya *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (1776), apabila pertumbuhan penduduk yang terlalu besar tidak diimbangi oleh peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perkembangan teknologi, maka akan terjadi kesulitan pertumbuhan kesejahteraan penduduk yang akan mengarah kepada kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan oleh Syamsuddin (2013) membuktikan bahwa Rasio Ketergantungan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin rendah rasio Ketergantungan, maka semakin besar pula potensi peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Hal ini mengindikasikan bahwa ketika jumlah penduduk yang bergantung secara ekonomi berkurang, beban yang ditanggung oleh kelompok usia produktif menjadi lebih ringan, sehingga produktivitas dapat meningkat dan sumber daya dapat dialokasikan secara lebih efisien. Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tersebut pada akhirnya berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan, karena membuka lebih banyak peluang kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperluas akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

Selanjutnya, studi oleh Vijayakumar (2013) memberikan bukti empiris yang kuat bahwa rasio ketergantungan memiliki pengaruh signifikan dan berkorelasi positif dengan tingkat kemiskinan. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan struktural utama yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, di mana tingginya beban tanggungan terhadap kelompok usia produktif membatasi kapasitas rumah tangga dan negara dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Vijayakumar (2013) juga menekankan bahwa dalam konteks negara-negara berkembang, rasio ketergantungan yang tinggi seringkali disertai dengan keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan kerja yang layak, yang secara kumulatif memperpanjang siklus kemiskinan dan kelaparan dalam jangka waktu yang lama.

Temuan oleh Margareni et al., (2016) memberikan bukti empiris bahwa pendidikan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan akses dan kualitas pendidikan merupakan salah satu strategi paling efektif dalam mengurangi kemiskinan secara struktural. Investasi di bidang pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemberdayaan individu, tetapi juga sebagai fondasi utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, yang pada gilirannya mendorong peningkatan produktivitas kerja dan daya saing ekonomi. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai, semakin besar peluang seseorang untuk memperoleh pekerjaan yang layak dengan penghasilan yang memadai, sehingga berkontribusi langsung terhadap penurunan angka kemiskinan. Oleh karena itu, pembangunan sektor pendidikan menjadi elemen kunci dalam upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.